

**FAKTOR KUNCI SUKSES PENDAPATAN ASLI DAERAH
MENGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY*
(Studi Deskriptif Pada Kabupaten Banjarnegara)**

**Ilham Gilar Wicaksono
Bambang Jatmiko**

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: ilhamgilar69@gmail.com**

ABSTRACT

The purpose of this study is to test and prove empirically the existence of correlations between variables of regional taxes, population, economic growth and regional expenditure. The problem in regional revenue (PAD) in Banjarnegara District which is not in accordance with the target set even the income is less than the target set in the previous year. The subject of this study is the Regional Financial and Asset Revenue Management Agency (BPPKAD) of Kabupaten Banjarnegara with an object of financial statements containing regional income, regional expenditure, regional tax, and gross regional domestic income (GRDP). In addition, researchers also use data on the number of population included in the productive age category, the data obtained through the official web of the Central Statistics Agency (BPS) of Banjarnegara Regency. This study uses qualitative methods with secondary data retrieval. Sampling in this study using purposive sampling. The analysis method used in this research is descriptive study.

The application to process data in this study uses SPSS v.15.0. The research model used is multiple correlation, where the test aims to find correlations or relationships between two or more variables. Furthermore, the researchers also used the value for money (VFM) method to analyze the PAD owned by the Banjarnegara Regency government. The value for money method has three criteria, namely, efficient, effective and economical (3E).

Keywords: Regional Original Revenue, Regional Tax, Regional Expenditures, Population

PENDAHULUAN

Otonomi daerah mulai di jalankan oleh pemerintah daerah atas perintah dari pemerintah pusat. Otonomi daerah mulai efektif dijalankan oleh pemerintah pada awal tahun 2001. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pendanaan pembangunan daerah tersebut, dengan adanya pendapatan asli daerah, ketergantungan pemerintah daerah akan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat akan mulai berkurang. Pendapatan asli daerah (PAD) di atur dalam UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.

Selain itu dalam pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Setiap daerah di Negara Indonesia memiliki kekayaan daerah yang berbeda, juga dalam cara memanfaatkannya.

Pendapatan asli daerah dimanfaatkan untuk pembangunan daerah tersebut seperti pembangunan infrastruktur Beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang pengertian PAD antara lain, Warsito (2001:128), pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari daerah yang di pungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba

dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Rahman (2005:38), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Jumlah penduduk juga mempengaruhi pendapatan asli daerah, dimana jumlah penduduk naik maka pajak ikut naik.

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017

Tahun / Pendapatan	Pajak	Retribusi	Pengelolaan Kekayaan	Pendapatan Lain yang Sah
2013	12.411.000	23.750.537	4.543.000	35.813.875
2014	27.770.000	26.090.137	6.582.563	43.059.650
2015	35.002.500	25.644.620	8.185.350	73.795.731
2016	39.217.500	28.167.341	27.359.670	99.379.963
2017	42.287.500	29.802.039	10.017.080	89.812.987

*dalam ribuan, dalam rupiah

Sumber: <https://banjarnegarakab.bps.go.id>

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi pada tahun 2016. Data tersebut didapatkan dari BPPKAD Kabupaten Banjarnegara. Kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun adalah sektor pajak. Pada berita yang dimuat dalam radarbanyumas.co.id terdapat berita yang menyatakan bahwa PAD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 pendapatan asli daerah tidak tergarap secara maksimal sehingga mendapat peringkat 3 terendah dalam pendapatan asli daerah se-Jawa Tengah yang tercatat.

Hal ini berkaitan dengan APBD yang mana seharusnya pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara dapat terealisasi lebih tinggi dari APBD (Anang Sutanto, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya BPPKAD Banjarnegara). Dengan kata lain pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 seharusnya dapat direalisasikan lebih tinggi. Dengan melihat karakteristik metode *VFM* maka dapat disimpulkan secara singkat bahwa metode ini berguna untuk menganalisis pendapatan asli daerah, yang mana pendapatan asli daerah sangat berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran untuk membangun daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah juga mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil yang diberikan dengan 3E (efisien, ekonomis dan efisien).

RERANGKA TEORI

1. Teori Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori stewardship bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para manager dalam perusahaan sebagai pelayan (steward) dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya. Dengan kata lain, stewardship theory memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan public dan umumnya maupun shareholders pada khususnya (Daniri 2005). Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

2. Populasi Penduduk

Aliran Malthusian, aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus. Pada permulaan tahun 1798 lewat karangannya yang berjudul "Essai on Principle of Populations as it Affect the Future Improvement of Society, with Remarks on the Specculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers", menyatakan bahwa penduduk akan berkembang biak dengan pesat dan tidak terkontrol apabila tidak ada pembatasan, dan akan memenuhi bumi ini. Jumlah penduduk bagi pandangan pemerintah berupa

asset pembangunan namun sekaligus juga beban pembangunan. Dalam teori lain mengatakan pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 4 komponen yaitu : (1) kelahiran, (2) kematian, (3) migrasi masuk, (4) migrasi keluar (Subri, 2003 : 16). Dari keempat komponen tersebut di Indonesia telah terjadi ledakan jumlah penduduk yang sangat besar.

3. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Davey (1988:39-40) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagikan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.
- e. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow membagi proses pertumbuhan menjadi lima tahap (Mudrajad:2003), yaitu:

a. Perekonomian Tradisional

Dalam tahap ini sumberdaya manusia digunakan dalam sektor pertanian.

b. Pra Kondisi Tinggal Landas

Dalam tahap ini masyarakat mulai mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri.

c. Tinggal Landas

Tahap ini merupakan suatu revolusi industri yang berhubungan dengan revolusi metode produksi, yang mana masyarakat mulai membuat inovasi dalam perekonomian berupa memproduksi barang atau jasa.

Selanjutnya pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (1998), pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada peningkatan output yang bersumber dari proses intern perekonomian itu sendiri dan sifatnya sedmentara.

5. Belanja Daerah

Menurut IASC Framework (Halim, 2002 : 73), “Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya menurut Undang-

Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

6. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

PENURUNAN HIPOTESIS

1. Korelasi Antara Jumlah Penduduk Dengan Pendapatan Asli Daerah

Jumlah penduduk berperan dalam peningkatan penghasilan pajak, karena jumlah wajib pajak ikut naik seiring dengan naiknya jumlah penduduk. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suci dan Yazid (2014) mendapatkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari, Vecky, dan Mauna (2016) didapatkan hasil jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Enjelina (2016), mendapatkan hasil jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik hipotesis:

H₁: terdapat korelasi antara jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah.

2. Korelasi Antara Pajak Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Prakosa (2005 : 2), bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Difu, M. Ruru dan Laloma (2013) mendapatkan hasil bahwa pajak daerah memiliki hubungan yang kuat dengan pendapatan asli daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Usman (2015) juga mendapatkan hasil pajak daerah memiliki hubungan dengan pendapatan asli daerah.

Dari uraian tersebut dapat di tarik hipotesis:

H₂: terdapat korelasi antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah.

3. Korelasi Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pendapatan Asli Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2007), menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Desislava (2016), mendapatkan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan I Made (2016), menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hotman, dan Heatubun (2013), menyatakan pendapatan asli daerah memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis:

H₃: terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah.

4. Korelasi Antara Belanja Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah

Sianturi (2010), menyatakan terdapat keterkaitan antara pendapatan asli daerah dengan alokasi belanja modal. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Belanja modal termasuk dalam belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan dan Syukriy (2016), mendapatkan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis:

H₄: terdapat korelasi antara belanja daerah dengan pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kabupaten Banjarnegara yang berada dalam Provinsi Jawa Tengah karena pada tahun 2017 Kabupaten Banjarnegara menempati peringkat 3 terendah PAD se-Jawa Tengah.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana data akan di peroleh melalui studi dokumen. Data akan diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yang merupakan salah satu dari beberapa jenis teknik sampling. Purposive sampling adalah tektik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti hanya mengambil data yang di perlukan untuk penelitian ini dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Jumlah Pajak Daerah
- b) Jumlah Penduduk Usia Produktif
- c) Pertumbuhan Ekonomi
- d) Belanja Daerah
- e) Pendapatan Asli Daerah

Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara.

5. Definisi Operasional Variabel

- a) Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang dipungut sendiri oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam urusan dana.

- b) Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan jumlah masyarakat yang terdaftar melalui sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini jumlah pemduduk yang

dimaksud adalah jumlah penduduk yang berusia 17 tahun keatas/ sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2) Pajak Daerah

Menurut Adisasmita (2011) pajak daerah merupakan kewajiban penduduk masyarakat membayarkan sebagian dari kekayaan yang dimilikinya kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan penambahan pendapatan masyarakat dalam suatu daerah yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat itu sendiri. Pertambahan pendapatan dapat diukur dalam nilai riil, dalam artian lain dapat dinyatakan dalam harga konstan (Tarigan, 2004).

4) Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum dan daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Afiah, 2009). Dalam artian lain belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan masyarakat.

6. Uji Hipotesis

Tabel 2
Uji Korelasi

Correlations

		Jumlah Penduduk (X1)	Pajak Daerah (X2)	PDRB (X3)	Belanja Daerah (X4)	Pendapatan Asli Daerah (Y)
Jumlah Penduduk (X1)	Pearson Correlation	1	.559	.748	.666	.743
	Sig. (2-tailed)		.328	.146	.220	.150
	N	5	5	5	5	5
Pajak Daerah (X2)	Pearson Correlation	.559	1	.911*	.905*	.932*
	Sig. (2-tailed)	.328		.031	.035	.021
	N	5	5	5	5	5
Pertumbuhan Ekonomi (X3)	Pearson Correlation	.748	.911*	1	.992**	.960**
	Sig. (2-tailed)	.146	.031		.001	.010
	N	5	5	5	5	5
Belanja Daerah (X4)	Pearson Correlation	.666	.905*	.992**	1	.942*
	Sig. (2-tailed)	.220	.035	.001		.017
	N	5	5	5	5	5
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pearson Correlation	.743	.932*	.960**	.942*	1
	Sig. (2-tailed)	.150	.021	.010	.017	
	N	5	5	5	5	5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a) Uji Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel jumlah penduduk dengan pajak daerah. Dari hasil uji korelasi pada tabel 6 diatas menunjukkan nilai *sig.(2-tailed)* sebesar 0.150 > alpha 0.05 dengan nilai *pearson correlation* sebesar 0.743 yang berarti tidak ada korelasi antara jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan tidak terdapat korelasi atau H1 **ditolak**.

b) Uji Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Dari hasil uji korelasi pada tabel 6 diatas menunjukkan nilai *sig(2-tailed)* sebesar $0.021 < \alpha 0.05$ dengan nilai *pearson correlation* sebesar 0.932 yang dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berkorelasi dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi atau H2 **diterima**.

c) Uji Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 6 diatas variabel pada hipotesis 3 yaitu pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah memiliki nilai *sig(2-tailed)* sebesar $0.010 < \alpha 0.05$, dengan nilai *pearson correlation* sebesar 0.960 yang dapat diartikan terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi atau H3 **diterima**.

d) Uji Hipotesis 4

Berdasarkan pada tabel 6 diatas menunjukkan variabel belanja daerah dengan pendapatan asli daerah memiliki nilai *sig(2-tailed)* sebesar $0.017 < \alpha 0.05$, dengan nilai *pearson correlation* sebesar 0.942 yang dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara belanja daerah dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi atau H4 **diterima**.

7. Pembahasan

a) Korelasi Antara Jumlah Penduduk Dengan Pendapatan Asli Daerah

Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk tenaga maupun pikirannya. Dalam kaitannya dengan pajak daerah, jumlah penduduk umur produktif yang sudah bekerja maupun berwirausaha sudah terdaftar menjadi wajib pajak. Pajak yang dapat

dipungut melalui jumlah penduduk berupa pajak penghasilan bagi yang sudah memiliki pekerjaan atau wirausaha. Sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Kabupaten Banjarnegara masih kurang paham akan pentingnya pendapatan asli daerah yang di pungut oleh pemerintah daerah.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada Pimpinan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, beliau mengatakan bahwa tingginya jumlah penduduk tidak akan mempengaruhi pendapatan asli daerah karena jumlah penduduk bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

b) Korelasi Antara Pajak Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan faktor utama yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Semakin tingginya pajak yang diterima oleh pemerintah daerah maka pendapatan asli daerah akan ikut meningkat seiring dengan meningkatnya pajak daerah. Pajak daerah dalam Kabupaten Banjarnegara tergolong tinggi karena memiliki wisata, sarang burung walet yang cukup banyak. Sedangkan pajak daerah yang cukup rendah diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu pajak kendaraan bermotor. Masih banyak warga yang tidak paham akan pentingnya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah.

c) Korelasi Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pendapatan Asli Daerah

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah maka pertumbuhan ekonomi dalam periode berjalan akan meningkat pula. Pernyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan BPPKAD dalam hasil wawancara beliau mengatakan bahwa semakin tingginya pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

d) Korelasi Antara Belanja Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah

Dengan hasil pengujian penelitian ini mendapatkan hasil bahwa belanja daerah berkorelasi signifikan positif dengan pendapatan asli. Hal tersebut dapat dikarenakan dengan meningkatnya belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk meningkatkan hasil bumi yang dimiliki untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dengan maksimal. Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, beliau mengatakan bahwa belanja daerah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kemakmuran masyarakat dan peningkatan kualitas untuk pemungutan pendapatan asli daerah agar pendapatan asli daerah dapat meningkat secara signifikan.

e) Analisis Pendapatan Asli Daerah Menggunakan Metode *Value For Money*

1) Tingkat Ekonomis

$$\text{Tingkat ekonomis} = \frac{\text{Relisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pengeluaran Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3
Kriteria Ekonomis

Persentase Ekonomis	Kriteria Ekonomis
<90%	Sangat Ekonomis
90-95%	Ekonomis
96%-100%	Kurang Ekonomis
>100%	Tidak Ekonomis

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

Tabel 3.1
Tingkat Ekonomis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Pengeluaran Daerah	Tingkat Ekonomis
2013	98.975.180.350	8.147.000.000	12%
2014	161.652.537.773	5.456.500.000	29%
2015	153.482.413.212	6.203.500.000	22%
2016	221.048.387.512	23.612.500.000	9,36%
2017	297.485.382.003	12.626.605.000	23,5%

*dalam rupiah

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2013-2017 memasuki kategori sangat ekonomis. Dalam artian bahwa pendapatan asli daerah lebih tinggi daripada pengeluaran daerah yang menggunakan dana dari pendapatan asli daerah tersebut.

2) Tingkat Efisien

$$\text{Tingkat efisien} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pengeluaran Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 4
Kriteria Efisien

Persentase Efisien	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
71%-100%	Kurang Efisien
50%-70%	Cukup Efisien
21%-49%	Efisien
<20%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Tabel 4.1
Tingkat Efisien Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Pengeluaran Transfer	Tingkat Efisiensi
2013	98.975.180.350	1.415.716.234	69%
2014	161.652.537.773	1.530.927.373	10%
2015	153.482.413.212	3.865.528.375	30%
2016	221.048.387.512	4.958.044.000	44%
2017	297.485.382.003	5.262.859.000	56%

Sumber: Data diolah peneliti, 2019.

Dari hasil perhitungan di atas pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2013-2017 tidak ada yang memasuki kategori

tidak efisien. Dalam artian pada periode tersebut pendapatan asli daerah dapat dikatakan efisien.

3) Tingkat Efektif

$$\text{Tingkat efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5
Kriteria Efektifitas

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
<20%	Tidak Efektif
21%-49%	Kurang Efektif
50%-79%	Cukup Efektif
80-100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.
Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

Tabel 5.1
Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Efektivitas
2013	98.975.180.350	88.557.495.000	111%
2014	161.652.537.773	127.171.027.100	127%
2015	153.482.413.212	133.023.527.100	115%
2016	221.048.387.512	194.123.974.100	113%
2017	297.485.382.003	277.400.917.500	107%

*dalam rupiah

Sumber: Data diolah peneliti, 2019.

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah pada periode tersebut secara keseluruhan memasuki kategori efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk tidak berkorelasi dengan pendapatan asli daerah yang berarti dengan tingginya jumlah penduduk tidak selalu meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Pajak daerah berkorelasi positif signifikan pendapatan asli daerah yang artinya dengan tingginya pendapatan pajak yang diterima dapat juga meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi signifikan positif dengan pendapatan asli daerah yang artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam Kabupaten ini maka pendapatan asli daerah yang didapatkan oleh pemerintah daerah juga akan meningkat.
4. Belanja daerah berkorelasi signifikan positif dengan pendapatan asli daerah yang berarti semakin besar belanja yang dilakukan oleh pemerintah maka dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah dalam periode tersebut sedang mengalami kenaikan.
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara memiliki kriteria dalam metode *value for money*, yang mana metode tersebut memiliki kriteria: ekonomis, efisien, efektif.

2. Saran

1. Pemerintah Pusat

Peneliti menyarankan untuk pemerintah pusat untuk dapat melaksanakan sosialisasi pentingnya pajak kepada masyarakat.

Selain itu juga membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat supaya mengurangi pengangguran.

2. Pemerintah Daerah

Saran peneliti untuk pemerintah daerah sebaiknya dalam pemungutan pajak penghasilan dapat dilakukan secara intensif atau bisa langsung melalui tempat dimana perorangan itu bekerja dengan cara langsung memotong gajinya untuk pajak dan memberikan bukti pembayaran pajak penghasilan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

3. Penelitian Selanjutnya

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya ada beberapa point sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian seperti menambahkan beberapa Kabupaten atau Provinsi yang ada di Indonesia, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih menguji teori dengan baik.
- b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel dalam penelitiannya yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah atau mengganti metode yang digunakan agar lebih bervariasi.
- c. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan atau mengganti variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah agar lebih bervariasi.

Daftar Pustaka

- Adi P. H., 2007. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali). *Jurnal Akuntansi Dan Sektor Publik* 08 (01), 1450-1465, Februari 2007
- Adisasmita, Raharjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiah, Nur, N. 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Predana Media Group.
- Apriana D., & Suryanto, R., 2010. Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali). *Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Arianto P. S., 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3(1).
- Ariasih. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE Universitas Gajah Mada.
- Boediono. 1998. *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 2*. BPFE : Yogyakarta.
- Brata A. G., 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Chaundhuri, Primit. 1989. *“The Economic Theory of Growth.”* Harvester Wheatsheaf.
- Daniri, M. A., 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia.
- Davey, K.J., 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Desislava, Stoilova. 2016. Tax structure and economic growth: Evidence from the European Union. *Contaduría y Administración*, 62(3), 1041-1057.

- Devita A., Delis, A., & Junaidi, J., 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70.
- Difu, Julick F., M. Ruru, Jorie, Laloma, Alden. 2013. Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Dina, A., & Suryanto, R., 2010. Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 11(1), 68-79.
- Djarwanto, 1994. Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi. Jakarta. Rineka Cipta.
- Donaldson, L & Davis J.H., 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*, 17, 49.
- Enjelina, Meivira. 2016. Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Sijunjung. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Fraenkel, J.R dan Wellen, N.E., 2008. *How to Design and Evaluate research in Education*. New York: McGraw-Hill.
- Gunawan, A., & Sukartha, I. M., 2016. Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2036-2060.
- Hadjon, P. M., 1990, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. 1995, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim A., 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama , Salemba empat, Jakarta.
- Handayani, Putri HS, Syukriy Abdullah, Heru Fahlevi. 2015. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Horota, P., Ida, A., & Purba, R, 2017. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Hotman J., Heatubun Adolf B., 2013. Analisis Dampak Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah). Repository Universitas Terbuka.

- Irdha Gorahe, Masinambow, V., & Engka, D., 2010. Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3).
- Jatmiko, B., 2014. *Key Success Factors of Local Revenue Toward City And District Government Performance In Yogyakarta*. Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga.
- Lestari, Siska, Vecky A.J Masinambow dan Mauna Th. B Maramis., 2016. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16 No. 02 Tahun 2016. Hal. 306-314.
- Mardiasmo. 2002. Dalam Buku Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. Dalam Buku Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Cetakan Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi* ISSN, 2302, 0164.
- McMahon, W. W., & Boediono, W. W., 1992. Universal basic education: An overall strategy of investment priorities for economic growth. *Economics of Education Review*, 11(2), 137-151.
- Mudrajad. 2003. Dalam Buku Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Danisa Media, Sleman, Yogyakarta.
- Mulyadi Subri, 2003. Ekonomi Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Murni, A., 2006. Ekonomika makro. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Nur F. 2014. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI*.
- Nurzen, Miardi., & Riharjo, I. B., 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(4).
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/KabupatenBanjarnegara-16-2010.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/--376-490-PP58_2005.pdf
- Philipus, M., Hadjon 1995. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Prakosa, K. B., 2005. Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta: ULL Press.
- Pratolo, S, & Binang Sukma Yudha. 2012. Peran Faktor-Faktor Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 144-160.
- Rahman, H. 2005. Pendapatan Asli Daerah.
<http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-aslidaerah.html>).
- Ramhatullah. 2015. Pengaruh Penduduk Umur Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Visipena* Vol. 6, no 2 (2015).
- Ramlan, Darwanis dan Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Unsyiah* Vol 5, No 2: Mei 2016.
- Rasyadi, A. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan di Indonesia.
- Rochaida, Eny, 2016. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. In *Forum Ekonomi* (Vol. 18, No. 1).
- Rostow. Teori Pertumbuhan Ekonomi dalam Buku Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Danisa Media, Sleman, Yogyakarta.
- Safitri, I., & Aliasuddin, A., 2016. Pengaruh Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 56-65.
- Sasana, H. dan Argi R. (2011). Analisis Belanja Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009 (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sasana, H., 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).

- Sasana, Hadi. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiaji, W., & Adi, P. H., 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*.
- Sianturi, A., 2010. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2008. "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin".
http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/pros_2008mak3.pdf
- Smith, Adam. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edited by S. M. Soares. MetaLibri Digital. Library, 2007.
- Smith, Adam. 1776. *Teori Pertumbuhan Ekonomi dalam Buku Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Danisa Media, Sleman, Yogyakarta*.
- Suci, Puspita A., dan Padmono, Yazid Yud. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, Volume 3, Nomor 1.
- Sudadyo, H. T., 2013. *Pengaruh Faktor Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis: Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*.
- Sulastyawati, D., 2014. Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1).
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Jakarta: PT. Bumi Aksara*.
- Thomas Robert Malthus. 1798. "Essai on Priciple of Populations as it Affect the Future Improvement of Society, with Remarks on the Specculation of Mr. Godwin, M. Condoret, and Other Writers."
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/370.bpkp
- Usman, Regina. 2015. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Universitas Telkom.
- Valencia, Maria W., & Handayani, N., 2015. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(11).
- Wahyudi, M. V., & Handayani, N., 2016. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(11).
- Wahyuningsih, S., 2009. Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia. *Mediagro*, 5(1).
- Warsito. 2001. Hukum Pajak. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada
- Wong, John D., 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal : 413 – 423.